

Implementation of The Government Internal Control System in Accounting and Financial Reporting Practices: A Case Study at The Southeast Pontianak Sub-District Office

Ria Nur Sani Putri Kalimantan

Master of Accounting, Tanjungpura
University, Pontianak, 78124,
Indonesia

rianursaniputri@gmail.com

**Corresponding author*

Syarbini Ikhsan

Master of Accounting, Tanjungpura
University, Pontianak, 78124,
Indonesia

syarbini_ikhsan@yahoo.com

Haryono

Master of Accounting, Tanjungpura
University, Pontianak, 78124,
Indonesia

haryono@ekonomi.untan.ac.id

Rusliyawati

Master of Accounting, Tanjungpura University,
Pontianak, 78124, Indonesia
rusliyawati@gmail.com

Juanda Astarani

Master of Accounting, Tanjungpura University,
Pontianak, 78124, Indonesia
Juanda.astarani@ekonomi.untan.ac.id

• *Submitted: 2025-05-24; Accepted: 2025-05-25; Published: 2025-06-05*

Abstract— In an effort to strengthen good governance, the Government Internal Control System (SPIP) is a strategic instrument to improve accountability, transparency, and efficiency in the public sector. This study aims to explore the implementation of SPIP in the Southeast Pontianak Sub-district Office, identify the challenges faced, and understand the factors that affect its effectiveness. Using a qualitative approach with a case study method, data was collected through in-depth interviews, participant observations, and document analysis. The research informants were selected purposively from the structural ranks and technical staff of the sub-district. The results of the study show that the implementation of SPIP is still administrative and has not been fully integrated in financial management practices and public services. The five elements of SPIP the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring have not been carried out systematically. The main challenges include low understanding and competence of human resources, lack of leadership commitment, limited supporting infrastructure, weak technical regulations at the sub-district level, and ineffective evaluation mechanisms. Employee perceptions of SPIP also show that there is a gap between policies and practices in the field. In conclusion, the implementation of SPIP at the Southeast Pontianak Sub-district Office is still not optimal and requires comprehensive interventions, including strengthening human resource capacity, improving proactive leadership, and integrating SPIP into a more adaptive and participatory government management system. The results

of this study are expected to be the basis for improving SPIP implementation policies at the local level.

Keywords— SPIP, Governance, Policy Implementation, Sub-District, Accountability.

I. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah mengalami *transformasi* signifikan dalam tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan desentralisasi kekuasaan. Perubahan ini menuntut peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) hadir sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diterapkan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini mencakup lima komponen utama lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang dirancang untuk mencegah penyimpangan dan korupsi, sekaligus meningkatkan efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Implementasi SPIP yang efektif memiliki dampak signifikan. Pertama, dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, yang tidak hanya penting untuk akuntabilitas publik, tetapi juga sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Kedua, SPIP memperkuat integritas dan etika birokrasi, menciptakan

lingkungan yang lebih kondusif dan mengurangi potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, dengan penilaian risiko dan kontrol yang efektif, SPIP meningkatkan efisiensi operasional pemerintah, sehingga mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik. Meskipun telah lebih dari satu dekade sejak SPIP diperkenalkan, implementasinya di banyak tingkat pemerintahan masih menghadapi tantangan. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah belum menerapkan SPIP secara efektif, terbukti dengan temuan audit berulang, seperti kelemahan dalam sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap regulasi, dan inefisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa faktor menghambat optimalisasi implementasi SPIP. Pertama, kurangnya pemahaman dan komitmen pimpinan serta staf terhadap pentingnya SPIP. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi pengendalian intern. Ketiga, budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung penerapan SPIP. Keempat, kompleksitas birokrasi dan resistensi terhadap perubahan. Kelima, kurangnya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan SPIP. Dalam hal ini, Kantor Camat memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah di tingkat kecamatan. Sebagai unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik lokal, efektivitas SPIP di kecamatan akan berdampak signifikan pada kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik secara keseluruhan.

Pontianak Tenggara, salah satu kecamatan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menawarkan konteks menarik untuk penelitian tentang implementasi SPIP. Sebagai bagian dari kota yang berkembang, kecamatan ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik dengan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, implementasi SPIP yang efektif menjadi sangat krusial. Penerapan SPIP di Kantor Camat Pontianak Tenggara dapat berimplikasi signifikan terhadap tata kelola pemerintahan. SPIP berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan. Selain itu, SPIP dapat memperbaiki mekanisme pengawasan internal, mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan pesatnya perkembangan sosial-ekonomi di Pontianak, implementasi SPIP yang baik dapat menjadi fondasi penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya yang optimal dan berkelanjutan.

Namun, implementasi SPIP di Pontianak Tenggara menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SPIP di kecamatan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan lokal, tetapi juga berpotensi menjadi model dan pembelajaran berharga untuk implementasi SPIP di kecamatan lain di

Kalimantan Barat, bahkan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, studi tentang implementasi SPIP di Kantor Camat Pontianak Tenggara memiliki relevansi tidak hanya pada tingkat lokal, tetapi juga memberikan implikasi yang lebih luas dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian kualitatif yang membahas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Temuan-temuan dari studi-studi sebelumnya memberikan wawasan penting yang sangat relevan dengan topik ini (Nurhasanah, 2016). Dalam penelitiannya mengenai Pemerintah Kota Surabaya, ditemukan bahwa efektivitas implementasi SPIP sangat bergantung pada komitmen pimpinan dan pemahaman pegawai terhadap konsep SPIP. Studi ini menyoroti pentingnya sosialisasi yang intensif dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran tentang SPIP. Di sisi lain, penelitian (Widyaningtyas, 2014) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SPIP, termasuk kompetensi SDM, dukungan teknologi informasi, dan budaya organisasi.

Dalam konteks dampak SPIP terhadap kualitas laporan keuangan, studi kualitatif oleh (Bay & Tunti, 2019) di beberapa pemerintah daerah di Pulau Jawa menunjukkan bahwa implementasi SPIP yang efektif berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, studi ini juga menggarisbawahi bahwa hubungan ini tidak selalu linear dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual. Putra (2019) dalam penelitiannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mengungkapkan beberapa tantangan utama dalam implementasi SPIP, termasuk resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Lebih lanjut, studi kualitatif oleh (Pertiwi, 2016) di Pemerintah Kota Makassar menunjukkan bahwa implementasi SPIP yang efektif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Meskipun studi-studi sebelumnya memberikan wawasan berharga tentang implementasi SPIP di berbagai konteks pemerintahan di Indonesia, masih terdapat beberapa kesenjangan dalam literatur yang perlu diatasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada implementasi SPIP di tingkat provinsi atau kota/kabupaten, sementara penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi SPIP di tingkat kecamatan masih terbatas. Selain itu, mayoritas studi terdahulu dilakukan di wilayah Jawa dan Bali, sehingga ada kebutuhan untuk memperluas penelitian ke wilayah lain di Indonesia, termasuk Kalimantan, guna memahami perbedaan implementasi SPIP dalam konteks geografis dan budaya yang beragam.

Penelitian sebelumnya juga cenderung berfokus pada perspektif internal pemerintah, sehingga terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana implementasi SPIP dipersepsikan oleh stakeholder eksternal, seperti masyarakat dan lembaga pengawas

independen. Selain itu, sebagian besar studi yang ada berfokus pada dampak jangka pendek atau menengah dari implementasi SPIP, sementara diperlukan penelitian longitudinal yang dapat mengkaji dampak jangka panjang SPIP terhadap tata kelola pemerintahan. Terakhir, masih terbatas penelitian yang mengkaji bagaimana SPIP terintegrasi dengan sistem manajemen dan pengawasan lainnya di pemerintahan, seperti sistem manajemen kinerja atau sistem pelaporan keuangan.

Meskipun banyak penelitian telah membahas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di berbagai tingkat pemerintahan, terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur yang ada, khususnya terkait dengan implementasi SPIP di tingkat kecamatan dan di daerah di luar Pulau Jawa. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih fokus pada implementasi SPIP di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota atau provinsi) dan cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif. Kesenjangan ini penting untuk diatasi, mengingat karakteristik unik tingkat kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik, serta keragaman geografis dan budaya di luar Pulau Jawa yang dapat mempengaruhi implementasi SPIP. Pendekatan kualitatif diperlukan untuk memahami secara mendalam proses, tantangan, dan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi implementasi SPIP di tingkat kecamatan, yang sulit dicapai melalui pendekatan kuantitatif semata. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana SPIP diimplementasikan di Kantor Camat Pontianak Tenggara, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual tentang implementasi SPIP di tingkat kecamatan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Indonesia, serta memperkaya literatur tentang tata kelola pemerintahan dengan perspektif baru dari tingkat kecamatan dan daerah di luar Pulau Jawa.

II. KAJIAN LITERATUR

A. Konsep SPIP

Konsep SPIP di sektor publik Indonesia telah berkembang dari pendekatan yang semula fokus pada aspek keuangan dan kepatuhan menjadi sistem yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Sebelum diberlakukannya PP No. 60 Tahun 2008, pengendalian internal bersifat parsial dan belum menyeluruh (Widodo, 2016). Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari 'government' ke 'governance', dengan fokus tidak hanya pada pengamanan aset, tetapi juga pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintahan (Mardiasmo, 2018).

SPIP kini menjadi bagian penting dari upaya reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good governance, berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kinerja dan pelayanan publik (Sujarweni, 2015; Bastian, 2019). Selain sebagai alat pengendalian, SPIP juga dipandang sebagai mekanisme

strategis untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Mahmudi (2017) menegaskan bahwa sementara pengendalian internal di sektor swasta lebih berorientasi pada pencapaian laba dan kepentingan pemegang saham, SPIP memiliki fokus yang lebih luas mencakup pelayanan publik, akuntabilitas, dan pencapaian tujuan pemerintahan.

B. Teori Implementasi Kebijakan

Perkembangan teori implementasi kebijakan mencerminkan upaya untuk memahami dan menjawab tantangan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam konteks implementasi SPIP di tingkat kecamatan, teori-teori kontemporer menyediakan kerangka analitis yang penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan diterjemahkan secara efektif ke dalam praktik. Model-model ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi, termasuk struktur organisasi, kapabilitas aktor pelaksana, serta dinamika lingkungan lokal. Dengan demikian, teori implementasi kebijakan menjadi alat penting untuk memahami dan memperkuat pelaksanaan SPIP secara lebih kontekstual dan strategis di tingkat pemerintahan lokal.

Teori Implementasi Adaptif yang dikemukakan oleh Lester dan Goggin (1998), serta pengembangannya oleh O'Toole (2004), menekankan pentingnya fleksibilitas dan penyesuaian dalam implementasi kebijakan. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks implementasi SPIP di kecamatan, mengingat kebutuhan untuk mengadaptasi kebijakan nasional ke dalam konteks lokal yang spesifik.

C. Konsep Good Governance

Good Governance merupakan paradigma utama dalam administrasi publik modern yang menekankan pengelolaan kekuasaan secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut World Bank (2017), konsep ini mencakup proses dan institusi yang memastikan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial secara optimal untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Prasetyo dan Kompyurini (2017) menekankan bahwa teknologi informasi memainkan peran penting dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) modern. Menurut mereka, pemanfaatan TI dapat memperkuat efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian internal, khususnya melalui otomatisasi proses, peningkatan ketepatan dalam pengolahan data, serta kemudahan monitoring dan pelaporan. Di tingkat kecamatan, penerapan sistem informasi manajemen yang saling terintegrasi berpotensi mendukung kontrol internal yang lebih baik dalam berbagai kegiatan operasional, seperti pengelolaan anggaran, manajemen kepegawaian, hingga pelayanan publik. Meski demikian, mereka juga menggarisbawahi bahwa penerapan teknologi baru tidak lepas dari tantangan, termasuk kebutuhan pembiayaan infrastruktur, risiko keamanan data, dan dinamika perubahan organisasi. Oleh karena itu, Prasetyo dan Kompyurini menekankan perlunya pendekatan yang proporsional dalam adopsi teknologi, dengan

memperhatikan kesiapan institusi, kemampuan sumber daya manusia, serta kondisi lokal di tingkat kecamatan.

D. Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Pemerintahan tingkat kecamatan memegang peran penting sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat lokal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kecamatan merupakan unit administratif yang dipimpin oleh camat dan memiliki struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan secara efektif.

Struktur pemerintahan kecamatan mencakup Camat sebagai pemimpin utama, Sekretariat Kecamatan yang menangani aspek administratif, serta berbagai seksi fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas teknis. Selain itu, keberadaan kelompok jabatan fungsional memberikan kontribusi profesional sesuai dengan keahlian masing-masing. Peran strategis camat sebagai manajer wilayah, sebagaimana ditegaskan oleh Wasistiono (2016), menjadikan kecamatan sebagai aktor kunci dalam penyelenggaraan layanan publik dan implementasi kebijakan, termasuk SPIP, di tingkat local. Dengan struktur yang adaptif dan fungsional, pemerintahan kecamatan diharapkan mampu menjalankan tugas koordinatif, administratif, dan pelayanan secara optimal demi mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

E. Faktor Kontekstual dalam Implementasi SPIP

Keberhasilan implementasi SPIP di tingkat kecamatan sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual, khususnya terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kompetensi, pemahaman, dan pengalaman pegawai menjadi elemen kunci yang menentukan efektivitas penerapan prinsip-prinsip pengendalian internal. Namun, masih ditemukan kesenjangan kompetensi di lapangan akibat latar belakang pendidikan yang beragam dan minimnya pelatihan khusus terkait SPIP.

Sebagaimana ditegaskan oleh Sofyani dan Akbar (2015), penguatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, workshop, dan sistem mentoring menjadi langkah strategis yang penting. Selain itu, sistem rekrutmen dan penempatan pegawai yang tepat perlu dioptimalkan untuk memastikan posisi-posisi kunci dalam implementasi SPIP diisi oleh individu yang memiliki keahlian dan pemahaman yang memadai. Dengan demikian, pengelolaan faktor kontekstual secara cermat menjadi fondasi penting bagi keberhasilan implementasi SPIP di lingkungan pemerintahan kecamatan.

F. Evaluasi Implementasi SPIP

Evaluasi implementasi SPIP di tingkat kecamatan merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengendalian internal. Evaluasi ini dilakukan melalui pendekatan berlapis yang meliputi penilaian mandiri, audit internal, dan evaluasi eksternal. Penilaian mandiri memberikan gambaran awal dari perspektif internal, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kejujuran dan objektivitas pelaksanaannya. Audit internal oleh inspektorat daerah menambah kedalaman evaluasi melalui

pemeriksaan langsung atas dokumen dan praktik pengendalian. Sementara itu, evaluasi eksternal oleh BPKP atau auditor independen memberikan validasi objektif yang memperkuat hasil evaluasi secara keseluruhan.

Ketiga metode ini saling melengkapi dan harus diterapkan secara konsisten untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kualitas implementasi SPIP. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya, pemahaman yang belum merata, dan resistensi terhadap evaluasi tetap perlu diatasi agar evaluasi dapat menjadi alat strategis dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan.

III. METODE

Bagian metodologi memiliki peran penting dalam menjamin validitas dan reliabilitas penelitian mengenai implementasi SPIP di tingkat kecamatan. Metodologi yang dirancang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara objektif dan menyeluruh, dengan fokus pada eksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SPIP serta evaluasi efektivitasnya. Pendekatan metodologis yang digunakan bersifat sistematis dan terstruktur, untuk mengungkap realitas empiris, tantangan, peluang, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Metodologi ini menyediakan kerangka kerja yang kokoh dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, serta menjaga objektivitas dan kredibilitas temuan melalui metode ilmiah yang ketat.

Selain itu, metodologi ini dirancang agar hasil penelitian dapat digeneralisasi dan mendukung pengembangan kebijakan serta praktik SPIP di masa depan Creswell dan Creswell (2018). Dengan demikian, metodologi tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis pelaksanaan penelitian, tetapi juga menjamin kualitas hasil serta kontribusi nyata terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat lokal. Sebagaimana dijelaskan oleh Yin (2018), "Studi kasus tunggal memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara intensif suatu kasus yang mewakili fenomena yang diteliti."

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal yang berfokus pada implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kantor Camat Pontianak Tenggara. Desain ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena implementasi SPIP dalam konteks nyata, kompleks, dan spesifik secara lokal.

Pemilihan lokasi dan peserta penelitian dilakukan secara purposive, melibatkan individu-individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan SPIP dan memahami konteks organisasi secara mendalam. Dengan jumlah sampel 10–15 orang dari berbagai posisi strategis, penelitian ini berupaya menangkap perspektif yang beragam dan memperkuat validitas melalui triangulasi informan.

Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Pendekatan multi-metode ini memungkinkan triangulasi data, memperkuat kredibilitas, serta memperkaya

pemahaman tentang dinamika implementasi SPIP di lapangan. Analisis data dilakukan melalui proses pengkodean tematik menggunakan perangkat lunak NVivo 12, disertai strategi validasi seperti triangulasi sumber, member checking, peer debriefing, dan audit trail. Proses ini menghasilkan tema-tema kunci dan narasi yang merepresentasikan pemahaman kontekstual dan mendalam mengenai SPIP di tingkat kecamatan.

Dengan desain yang sistematis dan metodologis yang kuat, penelitian ini mampu menggambarkan kompleksitas implementasi SPIP secara menyeluruh serta memberikan kontribusi praktis dan teoretis terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif di tingkat lokal.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kantor Camat Pontianak Tenggara

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kantor Camat Pontianak Tenggara menunjukkan dinamika yang khas, baik dalam hal pemahaman konseptual, tahapan pelaksanaan, maupun integrasinya ke dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen internal, dapat digambarkan bahwa proses ini masih dalam tahap pengembangan dengan berbagai tantangan dan upaya perbaikan yang berjalan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dan pedoman dari BPKP, implementasi SPIP seharusnya dilakukan melalui lima unsur utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Namun, di tingkat kecamatan, tahapan ini belum sepenuhnya terstruktur.

Pada unsur lingkungan pengendalian, telah ada langkah awal berupa penetapan struktur organisasi dan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang cukup jelas. Namun, menurut wawancara dengan Sekretaris Camat, *"Belum ada dokumen resmi yang menyatakan kebijakan pengendalian intern secara eksplisit, apalagi yang terintegrasi dengan kegiatan keuangan."* Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap SPIP masih bersifat normatif.

Dalam penilaian risiko, belum tersedia instrumen formal seperti peta risiko atau matriks risiko yang seharusnya digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam proses pelayanan publik maupun pengelolaan anggaran. Identifikasi risiko masih dilakukan berdasarkan pengalaman personal, bukan analisis sistematis. Aktivitas pengendalian yang dilakukan pun bersifat rutin administratif, seperti pengawasan dokumen atau pemeriksaan berjenjang, namun belum ditopang oleh prosedur tertulis yang konsisten.

Pada aspek informasi dan komunikasi, mekanisme pelaporan kegiatan dan keuangan telah berjalan secara periodik, namun belum mengadopsi prinsip-prinsip pengendalian yang mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas berbasis risiko. Adapun pada unsur pemantauan, self-assessment SPIP telah dilaksanakan

setiap tahun, namun menurut salah satu kepala seksi, *"Kami hanya mengisi kuesioner SPIP sebagai formalitas. Tidak ada tindak lanjut langsung yang kami ketahui."*

B. Peran Aktor Kunci

Dalam pelaksanaan SPIP, aktor kunci yang terlibat adalah Camat, Sekretaris Camat (Sekcam), para kepala seksi, serta staf administrasi. Camat berperan sebagai pengarah kebijakan dan penanggung jawab tertinggi. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, keterlibatan Camat masih bersifat administratif dan belum menjangkau aspek strategis dari pengendalian internal.

Sekcam memainkan peran sentral dalam pengumpulan data dan penyusunan dokumen SPIP, namun keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan proses ini kurang optimal. Kepala seksi, yang seharusnya menjadi pelaksana teknis pengendalian di bidangnya masing-masing, sering kali belum memahami peran mereka dalam kerangka SPIP. Koordinasi antar bagian lebih banyak dilakukan secara informal dan reaktif, bukan melalui sistem koordinasi pengendalian yang terencana.

C. Integrasi SPIP dalam Praktik Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Integrasi SPIP ke dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di Kantor Camat Pontianak Tenggara masih terbatas. Meskipun dokumen keuangan seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah disusun sesuai ketentuan, namun pengendalian atas proses penyusunannya belum mengacu pada prinsip-prinsip SPIP secara penuh.

Sebagai contoh, tidak ditemukan bukti bahwa terdapat mekanisme verifikasi risiko dalam penyusunan anggaran atau pengeluaran. Kegiatan pemeriksaan atau validasi dokumen dilakukan lebih karena kewajiban administratif daripada bagian dari sistem pengendalian berbasis risiko. Hasil wawancara dengan staf keuangan menunjukkan bahwa *"SPIP belum kami gunakan secara langsung dalam penyusunan laporan. Yang penting dokumen rapi dan sesuai dengan format dari atas."* Hal ini menegaskan bahwa SPIP belum diinternalisasi dalam praktik keuangan sebagai alat untuk meningkatkan keandalan pelaporan.

D. Temuan Lapangan dan Persepsi Pegawai

Dari data empiris yang dikumpulkan, terdapat persepsi beragam di kalangan pegawai terkait implementasi SPIP. Beberapa pegawai memahami SPIP sebagai bentuk pelaporan tambahan yang cenderung membebani, bukan sebagai alat bantu untuk memperbaiki kinerja organisasi. Hal ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi aktif dalam proses pengendalian.

Observasi terhadap pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya administratif untuk menyusun dokumen SPIP, namun pelaksanaan di lapangan belum menunjukkan penerapan prinsip pengendalian internal secara nyata. Contohnya, tidak ada mekanisme monitoring berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran kecamatan di luar laporan pertanggungjawaban bulanan.

E. Tantangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SPIP di Kantor Camat Pontianak Tenggara

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat kecamatan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan faktor-faktor kontekstual yang memengaruhinya. Berdasarkan temuan lapangan melalui wawancara, observasi partisipan, serta telaah dokumen, terdapat sejumlah faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi SPIP di Kantor Camat Pontianak Tenggara. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan ke dalam lima aspek utama, yaitu: sumber daya manusia (SDM), komitmen pimpinan dan budaya organisasi, sarana dan prasarana pendukung, konteks kelembagaan dan regulasi, serta mekanisme evaluasi dan monitoring.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu tantangan utama dalam implementasi SPIP di tingkat kecamatan adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi pemahaman konseptual maupun keterampilan teknis dalam pengendalian internal. Sebagaimana dikemukakan oleh Sofyani dan Akbar (2015), keberhasilan implementasi SPIP sangat bergantung pada kompetensi dan pemahaman pegawai terhadap prinsip-prinsip pengendalian internal. Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar staf belum pernah mengikuti pelatihan formal terkait SPIP. Salah seorang staf menyatakan, *"Kami hanya tahu SPIP itu seperti pengawasan, tapi bagaimana caranya diterapkan dalam kegiatan harian, kami belum sepenuhnya paham."*

Kurangnya pelatihan yang terstruktur dan minimnya mentoring dari instansi teknis seperti BPKP menjadi kendala serius. Selain itu, latar belakang pendidikan pegawai yang beragam terutama di bidang non-akuntansi atau non-manajemen public menjadi faktor yang memperbesar kesenjangan pemahaman. Hal ini menyebabkan beberapa bagian penting dari proses SPIP, seperti penilaian risiko dan penyusunan aktivitas pengendalian, tidak dilakukan secara sistematis.

2. Komitmen Pimpinan dan Budaya Organisasi

Komitmen pimpinan merupakan determinan penting dalam keberhasilan implementasi SPIP. Camat dan kepala seksi memiliki peran strategis sebagai pengarah dan penggerak dalam integrasi SPIP ke dalam sistem kerja organisasi. Namun demikian, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa meskipun secara formal camat mendukung pelaksanaan SPIP, pelibatan aktifnya masih terbatas pada aspek administratif seperti penandatanganan dokumen. Budaya organisasi yang cenderung hierarkis juga menyulitkan proses komunikasi dan umpan balik dua arah, terutama dalam identifikasi risiko dan penyusunan tindakan mitigasi.

Beberapa staf mengungkapkan adanya *"ketakutan untuk menyampaikan potensi kelemahan pengendalian karena dianggap sebagai bentuk kritik terhadap pimpinan."* Ini menunjukkan lemahnya budaya transparansi internal. Resistensi terhadap perubahan, terutama dalam hal pelaporan yang lebih terbuka dan

berbasis bukti, juga menjadi kendala budaya yang signifikan. Tanpa kepemimpinan yang proaktif dan contoh nyata dari pimpinan, implementasi SPIP cenderung bersifat simbolik dan tidak menyentuh praktik substansial.

3. Sarana dan Prasarana Pendukung

Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur turut memengaruhi efektivitas implementasi SPIP, terutama dalam konteks pelaporan dan dokumentasi keuangan. Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain adalah ketersediaan perangkat teknologi informasi yang terbatas, tidak adanya sistem informasi pengendalian internal yang terintegrasi, serta proses dokumentasi yang masih manual. Akibatnya, pencatatan pengendalian risiko, aktivitas monitoring, dan tindak lanjut rekomendasi seringkali tidak terdokumentasi secara konsisten. Penggunaan aplikasi atau alat bantu digital dalam pengelolaan SPIP masih belum diterapkan secara optimal di kantor kecamatan. Hal ini menyebabkan efektivitas pemantauan dan evaluasi menurun, serta menyulitkan dalam melakukan penelusuran ulang terhadap aktivitas pengendalian yang telah dilakukan.

4. Konteks Kelembagaan dan Regulasi

Struktur kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan belum sepenuhnya mendukung penerapan SPIP secara komprehensif. Tidak terdapat unit atau tim pengendalian intern yang secara khusus bertugas menjalankan fungsi SPIP. Peran pengendalian lebih sering melekat pada tugas-tugas administrasi rutin, sehingga aspek strategis SPIP menjadi terabaikan. Selain itu, beberapa pedoman teknis dari pemerintah daerah atau instansi pusat belum diadaptasi sesuai dengan kondisi dan kapasitas di tingkat kecamatan. Terdapat pula ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dalam siklus pengendalian internal. Beberapa pejabat struktural mengaku belum memahami secara rinci peran mereka dalam SPIP karena belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari Inspektorat atau BPKP. Hal ini menimbulkan tumpang tindih atau kekosongan peran dalam pelaksanaan beberapa elemen SPIP, seperti monitoring dan evaluasi risiko.

5. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi merupakan aspek penting untuk menjamin bahwa SPIP tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pengelolaan pemerintahan. Di Kantor Camat Pontianak Tenggara, evaluasi SPIP dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* dan audit internal oleh Inspektorat. Namun, pelaksanaan *self-assessment* masih bersifat formalitas. Salah seorang kepala seksi mengungkapkan, *"Kami mengisi kuesioner penilaian SPIP seperti biasa, tapi tidak tahu apakah itu benar mencerminkan kondisi di lapangan."*

Audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat belum rutin dan lebih berfokus pada kepatuhan administratif daripada evaluasi terhadap efektivitas pengendalian. Evaluasi eksternal dari BPKP pun belum menjangkau kecamatan secara spesifik, karena prioritas pengawasan lebih difokuskan pada level dinas atau SKPD strategis.

V. KESIMPULAN

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kantor Camat Pontianak Tenggara masih menghadapi berbagai tantangan baik secara struktural maupun kultural. Secara umum, proses penerapan lima unsur utama SPIP lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan belum berjalan secara utuh dan sistematis. Beberapa tahapan telah dilakukan secara administratif, namun belum dilandasi oleh pemahaman konseptual yang kuat ataupun prosedur teknis yang terstandarisasi.

Peran aktor kunci seperti Camat, Sekcam, dan kepala seksi penting dalam mendorong implementasi SPIP, namun keterlibatan mereka masih terbatas pada pemenuhan kewajiban formal. Integrasi SPIP ke dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan pun belum optimal, dengan fokus yang masih dominan pada pemenuhan format dokumen dibandingkan prinsip pengendalian berbasis risiko.

Faktor-faktor penghambat utama yang ditemukan antara lain rendahnya kapasitas SDM, lemahnya komitmen pimpinan, minimnya sarana pendukung, belum jelasnya regulasi teknis, serta mekanisme evaluasi yang belum fungsional. Persepsi pegawai terhadap SPIP juga menunjukkan bahwa sistem ini belum dipandang sebagai alat manajerial yang efektif, melainkan hanya beban administratif tambahan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan dari aspek pelatihan, kepemimpinan yang lebih partisipatif, infrastruktur pendukung, serta penyesuaian regulasi agar SPIP benar-benar dapat menjadi instrumen tata kelola yang efektif di tingkat kecamatan.

REFERENSI

- Bay, P. G., & Tunti, M. E. D. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 138–147.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Lester, J. P., & Goggin, M. L. (1998). *Back to the Future: The Rediscovery of Implementation Studies*. *Policy Currents*, 8(3), 1–9.
- Mahmudi. (2017). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marshall, B., Cardon, P., Poddar, A., & Fontenot, R. (2013). Does sample size matter in qualitative research?: A review of qualitative interviews in IS research. *Journal of Computer Information Systems*, 54(1), 11–22.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Nurcholis, H. (2017). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Nurdin, G. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 19–28.
- Nurhasanah, N. (2016). Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, karakteristik Instansi dan Kasus Korupsi (Studi Empiris Di Kementerian/Lembaga). *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2, 27–48.
- O'Toole, L. J. (2004). The Theory–Practice Issue in Policy Implementation Research. *Public Administration*, 82(2), 309–329.
- Pertiwi, D. (2016). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi*.
- Prasetyo, A. G., & Kompyurini, N. (2017). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mencegah Terjadinya Fraud pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), 67–76.
- Putra, P. W. G. S., & Suwandana, I. G. M. (2019). Pengaruh Motivasi, Gaya Kepemimpinan Transformasional, Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Semangat Kerja Pegawai. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2973.
- Sofyan, A. (2019). Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 112–125.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Ismorfisma Institusional. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(2), 153–173.
- Wasistiono, S. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Wibowo. (2019). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widyaningtias, E. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan kapasitas Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah se-Jabodetabek.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications